

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian analisis data pada fokus penelitian kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu, maka disimpulkan bahwa kebijakan ini belum dapat terlaksana dengan baik. pernyataan tersebut didasarkan pada hasil penelitian dilihat dari aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi serta faktor-faktor penghambat yang dialami dilapangan. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut::

1. Implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu yang terdiri dari:
  - a) Tujuan utama Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan khususnya masyarakat Kelompok Perempuan Mandiri peserta Program Keluarga Harapan. Kemiskinan yang hendak diatasi mencakup kemiskinan wawasan, kemiskinan akses dan kemiskinan finansial. Pengentasan kemiskinan wawasan dilaksanakan melalui

pembinaan dan pendampingan secara rutin untuk merubah pola pikir ( *mind-set* ) peserta KPM PKH, sementara pengentasan kemiskinan akses dilaksanakan melalui pembentukan pola kemitraan dengan pihak swasta yang berdomisili di Kota Batu. Pada akhirnya, dengan mengentaskan masalah kemiskinan wawasan dan kemiskinan akses, maka secara otomatis kemiskinan finansial dapat teratasi dan pada akhirnya dapat menciptakan kemandirian masyarakat khususnya peserta KPM PKH .

- b) Proses implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu telah melalui beberapa tahap yang terdiri dari tahap organisasi, tahap interpretasi dan aplikasi. Pembentukan dan penataan sumberdaya, unit-unit serta metode-metode yang digunakan dalam implementasi kebijakan ini sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu dengan baik. Selanjutnya agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan (interpretasi), maka Dinas Sosial melaksanakan sosialisasi yang cukup baik. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh dan hampir menyentuh kesemua aktor-aktor yang dianggap terlibat. Pendampingan dan pembinaan peserta KPM PKH dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan sektor privat. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap aplikasi dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan oleh pihak Dinas Sosial dengan aktivitas rutin yang sudah ditetapkan yaitu sekali per bulan

dengan mendatangi rumah-rumah peserta KPM PKH dimana seluruh anggota kelompok dari suatu kelompok telah berkumpul. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan oleh pendamping khususnya dalam usaha-usaha ekonomi kreatif dilakukan melalui koordinasi dengan pihak swasta untuk menciptakan kualitas produk usaha ekonomi produktif yang lebih baik serta kuantitas produk yang diperlukan

- c) Komponen-komponen penting dalam Implementasi Kebijakan, meliputi:
1. Ditinjau dari aspek komunikasi. Komunikasi dilakukan pada saat awal sebelum pelaksanaan kebijakan dan juga pada saat pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi transmisi dimana komunikasi telah mencakup hampir keseluruhan aktor-aktor yang terlibat, dimensi kejelasan dimana para aktor telah mengetahui maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik. Namun, bila ditinjau berdasarkan dimensi konsistensi belum terlaksana dengan konsisten yang disebabkan oleh minimnya SOP.
  2. Ditinjau dari aspek sumberdaya. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan ini telah digunakan secara bertanggungjawab. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya wewenang, sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya anggaran. Permasalahan utama terdapat pada sumberdaya manusianya. Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih tidak memadai terutama dalam

pelaksanaan tugas pembinaan dan pendampingan. Jumlah sumberdaya manusia yang tidak memadai menyebabkan esensi dari proses pembinaan dan pendampingan dilihat dari aspek kuantitas maupun kualitas tidak dapat tercapai dengan baik.

3. Ditinjau dari disposisi dari setiap aktor yang terlibat. Implementasi Kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu telah dilaksanakan dengan komitmen yang baik. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi yang dapat diselesaikan oleh para pelaksana sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Kepatuhan serta kedisiplinan para pelaksana kebijakan terutama pada saat proses pendampingan adalah suatu bentuk komitmen yang cukup baik. Permasalahanan utama terletak pada komitmen pihak swasta dan sikap masyarakat peserta KPM PKH . Sebagian besar pihak swasta memiliki komitmen yang pasif dan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai partner mitra. Demikian juga masyarakat. Sikap masyarakat dalam implemementasi kebijakan ini menerima tetapi cenderung pasif. Sikap masyarakat dalam menerima dan menjalankan kebijakan ini melalui proses pembinaan dan pendampingan cenderung tidak berdasarkan kesadaran sendiri melainkan suatu paksaan yang berisi sanksi sebagai peserta program PKH

4. Ditinjau dari Struktur Birokrasi. Permasalahan utama adalah tidak adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dibentuk secara khusus untuk proses implementasi kebijakan ini. Selama ini, proses implementasi kebijakan hanya didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati bersama. Dengan demikian, tidak ada aturan-aturan yang jelas dalam proses implementasi kebijakan karena nota kesepahaman yang dijadikan landasan untuk melaksanakan kebijakan tidak mengatur secara jelas mengenai kepastian waktu, sumberdaya,serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi, pembagian tugas dan lain-lain Selain itu, dengan tidak adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam kebijakan ini mengakibatkan tanggungjawab-tanggungjawab oleh setiap aktor terutama dalam kemitraan ini tidak jelas.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan Melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan di Kota Batu

Faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini meliputi 2 faktor utama. Faktor pertama adalah adanya dukungan dari Dinas Perindustrian dan perdagangan melalui pelatihan dalam usaha ekonomi produktif seperti pelatihan untuk membuat kemasan. Dengan adanya dukungan ini, maka sangat berpengaruh dalam proses pembinaan dan pendampingan terhadap para target

sasaran. Proses pembinaan dan pendampingan tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial tetapi juga dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Faktor kedua adalah meningkatnya kesadaran masyarakat KPM PKH untuk berwirausaha yang didukung oleh potensi pariwisata Kota Batu yang sangat mendukung upaya-upaya pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan

Selanjutnya, terdapat 3 faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu terdiri dari: 1) Kapasitas target sasaran yaitu masyarakat peserta KPM PKH di Kota Batu yang masih berada dibawah standar. Rendahnya kapasitas para peserta KPM PKH di Kota Batu sangat berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan ini. Selain mengakibatkan beban tugas yang harus dilaksanakan oleh para pendamping menjadi semakin berat, hal ini juga mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan dalam usaha ekonomi produktif menjadi tidak maksimal baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, pola kemitraan yang dijalin tidak dapat dijalankan dengan baik akibat permintaan dari swasta terhadap produk tidak dapat terpenuhi. 2) Kendala dalam pembuatan sertifikasi/izin P-IRT. Izin ini tidak dapat dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif KPM PKH Kota Batu yang disebabkan karena tidak mampu memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan dalam pengurusan izin ini. 3) Antusiasme sektor swasta yang berbeda-beda dimana masih banyak terdapat sektor privat yang tidak

begitu antusias dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan ini.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan penulis dalam penelitian di lapangan, maka penulis mengajukan beberapa saran perbaikan yang dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya pemecahan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan tahunan yang bertujuan untuk membangun semangat para peserta KPM PKH seperti Lomba Kreatifitas antar Kelompok KPM PKH di Kota Batu, Rekreasi, Pameran hasil usaha ekonomi produktif dan lain-lain.
2. Untuk memperluas jaringan pemasaran produk-produk KPM PKH maka dapat dilakukan melalui pemasangan iklan pada media elektronik seperti Instagram, OLX, Line, Facebook dan lain-lain.
3. Perlu dilakukan kembali upaya-upaya untuk membangun komitmen antar setiap aktor khususnya terhadap pihak swasta dan masyarakat peserta KPM PKH. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif khususnya sektor swasta yang ada di Kota Batu dan masyarakat. Upaya-upaya dalam membangun komitmen dapat dilakukan melalui sosialisasi maupun himbauan-himbauan melalui media cetak seperti reklame/spanduk maupun media elektronik.
4. Perlu dibentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) secara khusus untuk proses implementasi kebijakan ini. SOP yang dibentuk hendaknya terpisah dari SOP khusus PKH yang dibentuk oleh Kementrian Pusat, sehingga proses pelaksanaan kebijakan tidak tumpang tindih dan dapat dilaksanakan berdasarkan pembagian

tanggung jawab. Selain itu, kepastian waktu, sumberdaya,serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi, pembagian tugas dan lain-lain dapat tertata secara jelas dan teratur.